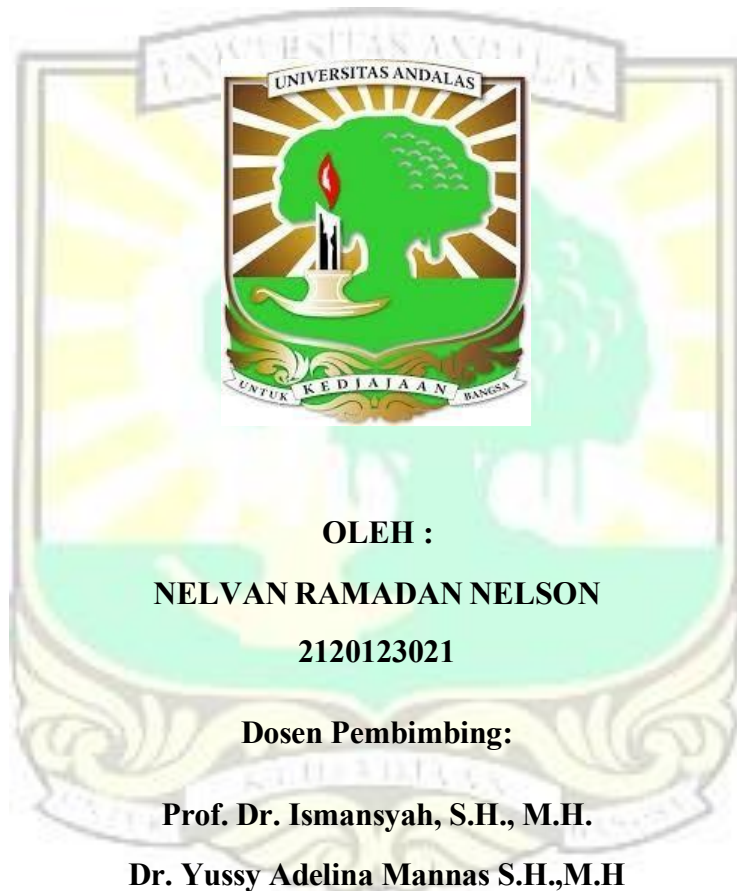


TESIS
PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK
MANFAAT DARI PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PEKANBARU

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan



OLEH :

NELVAN RAMADAN NELSON

2120123021

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.

Dr. Yussy Adelina Mannas S.H.,M.H

MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PEKANBARU

Nelvan Ramadan Nelson, 2120123021, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2025.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bentuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas Di Kota Pekanbaru. Penggunaan status Beneficial Ownership (BO) sering dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang melalui perusahaan, dengan cara menyamarkan identitas pemilik sebenarnya melalui berbagai hubungan tertentu. Sementara itu, tuntutan global terhadap transparansi BO semakin menguat dan telah menjadi tren di banyak negara. Adapun rumusan masalah, pertama Bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas oleh notaris di Kota Pekanbaru?, kedua Apakah hambatan dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas di Kota Pekanbaru? Dan Bagaimana akibat hukum bagi korporasi yang tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas di Kota Pekanbaru? Penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) oleh notaris merupakan strategi penting dalam meningkatkan transparansi, mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya memperkuat peran notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga menuntut adanya akuntabilitas dan kehati-hatian dalam melayani pengguna jasa. Hal ini sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, serta berbagai peraturan pelaksana terkait. Hambatan dalam Pelaksanaan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dalam struktur korporasi Perseroan Terbatas (PT) menghadapi sejumlah tantangan, baik yang bersifat struktural, administratif, maupun teknis. Hambatan-hambatan ini menjadi kendala dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Adapun implikasi hukum bagi korporasi yang tidak melaksanakan prinsip tersebut, khususnya bagi Perseroan Terbatas, berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 dan 23 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Jenis Sanksi Administratif Teguran Tertulis, Pencantuman dalam Daftar Hitam (Blacklistt) Informasi perusahaan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk sanksi administratif dan Pemblokiran Akses AHU Online Perseroan yang diblokir tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemilik Manfaat, Perseroan Terbatas .

Implementation of the Beneficial Ownership Recognition Principle in Limited Liability Companies in Pekanbaru

Nelvan Ramadan Nelson, 2120123021, Master of Notary Faculty of Law, Andalas University, 2025

ABSTRACT

This research examines the implementation of the beneficial ownership (BO) recognition principle in Limited Liability Companies in Pekanbaru. The concept of Beneficial Ownership (BO) is often exploited for money laundering activities through companies by concealing the true identity of the actual owner through certain relationships. Meanwhile, global demands for BO transparency have intensified and become a trend in many countries. The research problem formulation includes: first, how is the implementation of the beneficial ownership recognition principle by notaries in Pekanbaru? Second, what are the obstacles in implementing the beneficial ownership recognition principle in Limited Liability Companies in Pekanbaru? And third, what are the legal consequences for corporations that do not implement the beneficial ownership recognition principle in Pekanbaru? This study employs an empirical juridical approach. The findings of this research show that the implementation of the beneficial ownership recognition principle by notaries is a strategic step in strengthening transparency, preventing money laundering and terrorism financing, as well as ensuring compliance with laws and regulations. This principle not only strengthens the role of notaries as public officials but also demands accountability and caution in serving clients. This is in line with the obligations regulated in Presidential Regulation No. 13 of 2018, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017, and various implementing regulations. The obstacles in the implementation of the beneficial ownership recognition principle in Limited Liability Companies (LLCs) are structural, administrative, and technical in nature. Legal consequences for corporations that fail to implement the beneficial ownership recognition principle will face administrative sanctions imposed by the Ministry of Law and Human Rights. This provision is explicitly regulated in Articles 22 and 23 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 2 of 2025 concerning Verification and Supervision of Corporate Beneficial Owners. The types of administrative sanctions include written warnings, inclusion in the blacklist (blacklist), public disclosure of company information as a form of administrative sanction, and blocking of online access to the company's system. A blocked company will not be able to make changes to its Articles of Association.

Keywords: *Implementation, Beneficial Ownership, Limited Liability Companies.*